

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan aset tetap di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 yaitu sebagai berikut:

1. Aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, inventaris lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya, kemudian disajikan secara terpisah dalam neraca dan dirinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sudah 90% sesuai dengan PSAP No. 7. Pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, penilaian kembali, penghentian dan pelepasan serta pengungkapan aset tetap pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara telah sesuai dengan PSAP No. 7. Ketidaksesuaian terjadi pada penyusutan aset tetap karena perhitungan penyusutan aset tetap belum

diberlakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara karena belum diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah untuk perhitungan penyusutan dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5.2. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara sebaiknya melakukan penyusutan sendiri, agar instansi dapat mengetahui beban penyusutan setiap tahunnya tanpa menunggu dari pemda.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah atas aset tetap yang sudah cukup efektif harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan penelitian, yaitu:

1. Kurangnya data yang diperoleh dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara secara detail karena menyangkut kerahasiaan serta kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2. Tidak adanya informasi dari BPKA Kabupaten Lampung Utara, karena kesulitan mencari informan.